

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



COK ACE AJAK MEDIA ASAL TIONGKOK BANTU PULIHKAN PARIWISATA BALI

WALI KOTA DENPASAR
MINTA SEKOLAH BUAT
KEGIATAN MENDIDIK
SELAMA MPLS



Hal. 4

PEMKAB BADUNG
KOMITMEN ATASI
MASALAH SAMPAH
MELALUI TPS3R



Hal. 5

HAL
2

Pemprov DKI Jakarta dan Bali Teken Kerja Sama Pengembangan Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Bali menyepakati kerja sama dalam pengembangan potensi daerah hingga peningkatan pelayanan transportasi publik.

"Hari ini kami dan Provinsi Bali bisa bersepakat untuk berbagi bantuan dan pengalaman terkait dengan proses MRT, LRT, atau kendaraan massal yang berbasis kereta," kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat sambutan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov Bali dan PT MRT Jakarta (Perseroda), di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin.

Heru menyebut, pihaknya sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta.

"Dulu kita mulai dari Gubernur DKI Joko Widodo dan lanjut sampai hari ini. Mungkin suasananya berbeda dengan Bali, saya rasa Pak Wayan sebagai Gubernur Bali

atau irama mungkin dan sudah ada contohnya DKI Jakarta," kata Heru.

Pemprov DKI juga menyerahkan kepada Pemprov Bali untuk memilih moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik Bali di lapangan. Kemudian, terkait harga tiket ke pengguna, kata Heru dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menceritakan masalah yang saat ini dihadapi Bali terkait transportasi publik. Pemprov Bali mengaku membutuhkan pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian di Bali.

"Salah satu masalah adalah macet, terutama di Kabupaten Badung dan Denpasar. Itulah



Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Bali I Wayan Koster dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dan PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam pengembangan pelayanan publik, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza

sebabnya, kami mulai memikirkan transportasi publik, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah pengembangan transportasi berbasis rel," ucap Koster.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyebutkan lingkup kerja sama yang akan ditin-

dakanjuti antara lain pengembangan dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif dan penyelenggaraan ketahanan pangan. Juga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan badan usaha milik daerah, serta pengembangan transportasi publik. **(ant)**

Wagub Cok Ace Ajak Media Asal Tiongkok Bantu Pulihkan Pariwisata Bali



Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat bertemu media Tiongkok membahas pariwisata di Denpasar, Bali, Jumat (30/6/2023). ANTARA/HO-Pemprov Bali

WAKIL Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace mengumpulkan lima media asal Tiongkok untuk berbincang mengajak mereka membantu pulihkan pariwisata Pulau Dewata.

"Melalui kesempatan ini, saya harap kegiatan tidak hanya memulihkan pariwisata Bali, namun juga meredam berbagai informasi negatif yang sebagian besar tidak benar terkait dengan pariwisata

Bali," kata dia di Denpasar, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Cok Ace dalam Media Briefing Wonderful Indonesia Familiarization Trip for China Media yang turut dihadiri Deputy Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Made Marthini dan Konsulat Jenderal Tiongkok untuk Bali Zhu Xinglong.

Orang nomor dua di Pemprov Bali itu mengapresiasi kehadiran

media dari Tiongkok dalam upaya memulihkan dan mempromosikan pariwisata Bali setelah pandemi COVID-19, mengingat wisatawan dari negara tersebut salah satu yang terbanyak datang ke Bali sebelumnya.

Cok Ace menuturkan belangan banyak hal negatif yang dilakukan wisatawan asing, namun Pemprov Bali telah mengambil tindakan.

"Mereka melanggar aturan hukum atau tidak menghormati nilai dan norma budaya yang berlaku di Bali, seperti berkendara tanpa helm, bekerja di Bali dengan visa turis, dan lain-lain," ujarnya.

Adapun langkah yang akhirnya diambil pemerintah adalah menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2023 yang berisi informasi apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan selama mereka di Bali.

Surat tersebut telah dikompila-

si dengan narasi yang lebih ringkas dan sederhana menggunakan Bahasa Inggris, India dan China.

Pemerintah juga memberi kenyamanan dengan fasilitas seperti Visa on Arrival (VoA) untuk wisatawan dari 92 negara, bebas visa bagi 10 negara ASEAN dan Timor Leste, dan menghadirkan 36 maskapai internasional dari 29 kota terhubung.

"Bahkan untuk menarik minat wisatawan China kita sudah bekerja sama dengan membuka penerbangan dari Hongkong dengan Cathay Pacific tujuh kali seminggu, Hongkong Airlines lima kali seminggu, Xiamen Airlines tujuh kali seminggu, penerbangan ke Guangzhou dengan China Southern Airlines tiga kali seminggu, penerbangan ke Shanghai dengan China Eastern Airlines tiga kali seminggu, dan penerbangan ke Shenzhen dengan Lion Air tujuh kali seminggu," sebutnya. **(ant)**

Denpasar Unggulkan "Raditya" Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, mengunggulkan program Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya (Raditya) agar lolos dalam seleksi menuju Top 45 inovasi pelayanan publik pada ajang yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Rabu, mengatakan inovasi Raditya hadir sejak 2015 untuk memberikan ruang dan bakat di bidang penyiaran bagi penyandang disabilitas di Kota Denpasar.

"Sebelum ada inovasi Raditya, belum ada radio milik pemerintah ataupun swasta di Kota Denpasar yang secara khusus memberikan perhatian terhadap anak-anak penyandang disabilitas," ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan berbagai kelebihan inovasi Raditya tersebut saat mengikuti tahap wawancara di hadapan tim panelis independen menuju Top 45 inovasi pelayanan publik



dalam kompetisi pelayanan publik tahun 2023.

Inovasi Raditya sebelumnya sukses menjadi salah satu inovasi Kota Denpasar yang lolos Top 99 pada ajang kompetisi pelayanan publik tahun 2023.

Turut mendampingi, Kadis Kominfos Kota Denpasar IB Alit Adhi Merta, Kadis Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, dan Kadis P2AP2KB Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati.

"Raditya hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar terhadap sarana komunikasi, sosialisasi dan informasi mengenai layanan publik, pembangunan dan pendidikan,"



Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat mengikuti tahap wawancara di hadapan tim panelis independen menuju Top 45 inovasi pelayanan publik dalam kompetisi pelayanan publik tahun 2023 di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

ujarnya.

Selain itu untuk pelestarian budaya, kegawatdaruratan, kebencanaan, info lalu lintas dan hiburan yang bersifat inklusif sehingga dapat diterima serta dinikmati manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Kehadiran Raditya ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Denpasar

sebagai Kota Inklusi," ujarnya

Saat ini Radio Publik Kota Denpasar sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfos) Kota Denpasar, merupakan satu-satunya stasiun radio milik pemerintah yang telah memanfaatkan teknologi siaran digital. (ant)

Dekranasda Denpasar Pasarkan Kerajinan di Pameran Bali Bangkit 2023



Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar Sagung Antari Jaya Negara bersama jajaran saat menemui Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana di Denpasar. ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

DEWAN Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Denpasar mempromosikan berbagai jenis busana yang merupakan produk kerajinan dari UMKM lokal setempat dalam pembukaan Pameran Bali Bangkit 7 Tahun 2023 yang digelar Dekranasda Provinsi Bali.

Ketua Dekranasda Kota Den-

pasar Sagung Antari Jaya Negara di Denpasar, Rabu, mengatakan dalam ajang yang berlangsung di Taman Budaya Provinsi Bali itu pihaknya ditunjuk untuk menampilkan peragaan busana dengan empat macam desain.

"Keempat desain busana yang akan dipertontonkan adalah busana kerja ke kantor, busana

adat ke kantor, busana kasual, dan busana untuk undangan resmi," ujar istri Wali Kota Denpasar itu.

Para model yang akan memeragakan busana-busana tersebut merupakan pegawai di organisasi perangkat daerah dan perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Menurut Sagung Antari, melalui pembukaan Pameran Bali Bangkit 7 pada 7 Agustus 2023 itu sekaligus menjadi ajang untuk mempromosikan kerajinan dan industri lokal di Kota Denpasar.

Acara ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi perkembangan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar.

"Kami berharap masyarakat akan semakin mengapresiasi dan mengenal kerajinan serta industri lokal yang ada di Kota Denpasar," ucapnya.

Sagung Antari mengungkapkan kegembiraannya atas kesempatan ini dan menyatakan siap untuk memberikan penampilan terbaik dalam lomba peragaan busana itu.

Pembukaan Pameran Bangkit tahap 7 itu akan sekaligus menjadi momentum yang istimewa bagi Kota Denpasar dalam merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Dengan keterlibatan Dekranasda Kota Denpasar diharapkan semakin banyak orang yang tertarik dan terinspirasi untuk mengembangkan kerajinan dan industri lokal, serta meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan warisan Indonesia," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar IB Alit Wiradana memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dekranasda Kota Denpasar atas keputusannya untuk berpartisipasi dalam ajang Pameran Bali Bangkit. (ant)

Pemkot Tomohon dan Sitaro Pelajari Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar

PEMERINTAH Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau, Tegelandang dan Biaro (Sitaro) Provinsi Sulawesi Utara menyambangi Kota Denpasar untuk mempelajari potensi ekonomi kreatif di Ibu Kota Provinsi Bali itu.

"Kami melihat Kota Denpasar memiliki sektor ekonomi kreatif dan program unggulan di Dekranasda. Hal inilah yang ingin kami pelajari serta diadopsi untuk kami bawa," kata Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk di Denpasar, Jumat.

Rombongan yang dipimpin Wali kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk dan Wakil Bupati Sitaro Sulawesi Utara John Palandung ini diterima oleh Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa.

Hadir pula mendampingi dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut, Sekda Kota



Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana beserta jajaran terkait lainnya.

Caroll JA mengatakan tujuan kunjungan kerjanya untuk menggali pengetahuan mengenai berbagai program yang dimiliki Pemerintah Kota Denpasar mengenai sektor ekonomi kreatif sehingga dapat mendukung kemajuan kedua daerah di berbagai sektor.

Kota Tomohon memiliki luas 147,21 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 106.917 jiwa. Kota ini memiliki lima kecamatan dan 44 kelurahan.

Secara geografis merupakan kota yang berada di daerah pegunungan dengan iklim yang sejuk, sehingga menjadi salah satu ciri khas Tomohon adalah kota pertanian agroindustri dan kepariwisataan dimana 70 persen sumber pendapatan masyarakatnya berasal dari sektor pertanian.

"Dari hal itu kami ingin



Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Wali kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk dan Wakil Bupati Sitaro Sulawesi Utara John Palandung dan pihak terkait di Denpasar, Jumat (14/7/2023). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar.

mengembangkan potensi ekonomi berbasis kreatif selain hasil dari pertanian. Kami berharap, lewat ini kami bisa mendapat gambaran serta ilmu dari Kota Denpasar terkait hal itu," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan Kota Den-

pasar siap untuk berbagi ilmu dan juga melakukan kolaborasi dengan wilayah lainnya, tak terkecuali Kota Tomohon.

Kota Denpasar saat ini masih terus berinovasi serta melakukan terobosan untuk semakin meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan juga UMKM. (ant)

Wali Kota Denpasar Minta Sekolah Buat Kegiatan Mendidik Selama MPLS



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengalungkan tanda peserta kegiatan MPLS kepada perwakilan siswa di SMPN 14 Denpasar di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (10/7/2023). (ANTARA/Ni Luh Rhismawati)

WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara meminta sekolah-sekolah di wilayahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik dan

membangun kreativitas selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Sekarang itu agar lebih mengutamakan kreativitas.

Tidak ada lagi istilah hukum menghukum," kata Jaya Negara pada acara pembukaan MPLS di SMPN 14 Denpasar, Senin.

"Apalagi sekarang siswa sudah cerdas dan melek teknologi. Dia sudah paham betul dengan teknologi informasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah berperan penting dalam upaya mewujudkan generasi unggul tahun 2045.

"Tantangannya tentu kolaborasi, inovasi, dan kreativitas di dunia pendidikan di semua sekolah negeri maupun swasta yang ada di Kota Denpasar," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar AA Gede Wiratama mengatakan, MPLS di sekolah menengah pertama

negeri maupun swasta harus dimanfaatkan untuk membantu siswa mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Selain itu, menurut dia, MPLS bisa dijadikan sebagai sarana untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi maupun bakat mereka.

Di Kota Denpasar, MPLS berlangsung tiga hari dari 10 sampai 12 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan bakti sosial di lingkungan sekolah pada 13 Juli 2023.

"Kami ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah sehingga pelaksanaan MPLS berjalan baik dan lancar serta tidak ada hambatan. Ke depan kami akan terus lakukan perbaikan sistemnya," kata Wiratama. (ant)

Pemkab Badung Komitmen Atasi Masalah Sampah Melalui TPS3R

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali terus mewujudkan komitmennya untuk melakukan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya.

“Kami memiliki prinsip kalau kami membuang sampah berarti kami memindahkan masalah kami ke orang lain, oleh karena itu kami telah mendapat arahan dari Menteri Menko Marves untuk melaksanakan kegiatan di desa maupun di kelurahan paling tidak harus ada TPS3R dengan mengurangi, memilah dan mengolah sampah,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Seminyak, Badung, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan pada tahun 2024 pihaknya akan membuat ketentuan regulasi dan terus menyiapkan TPS3R dan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).

Apabila program itu telah berjalan, nantinya, setiap desa dan kelurahan pada hari Senin akan dijadwalkan untuk mengeluarkan sampah organik. Pada hari Selasa akan mengeluarkan sampah non-

organiknya dan hari Rabu akan mengeluarkan sampah basah.

“Target kami itu akan diolah menjadi salah satu bahan untuk pakan ternak, ini cara yang harus kami lakukan dan kami sekerang,” katanya.

Yang terbaru, Bupati Giri Prasta juga telah meresmikan Gedung Baru TPS3R Seminyak Mohija Collection Center di Desa Adat Seminyak, Badung untuk mengatasi permasalahan sampah di kawasan pariwisata Pulau Dewata itu.

Menurutnya, jajaran pemerintahan di Kabupaten Badung juga berterima kasih atas dukungan moral dan finansial dari berbagai pihak dalam upaya menjaga estitika Badung berkenaan dengan persampahan.

“Selanjutnya kami di Badung juga membangun TPST di wilayah selatan ada di Jimbaran,



Bupati Nyoman Giri Prasta meresmikan Gedung Baru Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Seminyak Mohija Collection Center Desa Adat Seminyak, Bali, Jumat (7/7). ANTARA/HO/Humas Pemkab Badung

wilayah tengah ada di Mengwitani dan di wilayah utara ada di Abiansemal,” kata dia.

Bupati Giri Prasta menambahkan upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung khususnya di Seminyak itu diharapkan dapat menjadi model percontohan di wilayah Provinsi Bali, Indonesia bahkan di tingkat internasional.

“Itu yang kami harapkan dalam melaksanakan kegiatan mengurangi, memilah dan mengolah ini. Dan intinya adalah untuk menumbuhkan ekonomi sirkular itu luar biasa sekali. Kami akan mendukung sepenuhnya. Sekali lagi saya tidak mau menimbun atau ada timbunan sampah,” kata Bupati Giri Prasta. (adv)

Sekda Adi Arnawa Terima Audiensi Dewan Ketahanan Nasional RI



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menerima audiensi dari Dewan Ketahanan Nasional RI di Puspem Badung, Selasa (4/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, mewakili Bupati Badung menerima audiensi sekaligus kunjungan kerja dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI yang dipimpin langsung oleh Brigjen. Pol Yulias bersama jajarannya di Puspem Badung, Selasa (4/7).

Sekda Adi Arnawa memberikan penjelasan kepada Wantannas RI bahwa Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten dari sembilan Kabupaten/Kota di Bali, yang PADnya bersumber dari sektor pariwisata.

Dijelaskan bahwa Kabupaten Badung yang berada di kaki Pulau

Bali merupakan salah satu barometer pariwisata yang ada di Bali maupun secara Nasional.

“Badung merupakan salah satu kabupaten dengan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata. Dari infrastruktur yang ada, Pemerintah Kabupaten Badung berencana membangun jalan lingkar selatan di wilayah Badung selatan dengan tujuan mengatasi kemacetan yang terjadi selama ini. Sedangkan di Badung utara memiliki sektor pertanian, dimana komitmen Bapak Bupati dalam rangka mendorong serta mendukung hasil pertanian dengan cara membeli Gabah hasil petani oleh Perumda Pasar untuk meningkatkan hasil pertanian petani kita, dengan harapan petani juga bangga menjadi petani. Berkenaan dengan hasil produk para petani maupun UMKM, masyarakat kami sudah beralih ke ekonomi

digital, sesuai perkembangan zaman transformasi ekonomi berbasis digital. Ini terus kita dorong, disamping Pemkab Badung juga memfasilitasi dalam memberikan penguatan, peningkatan SDM kepada para UMKM terutamanya berkenaan dengan hasil pemasaran produk UMKM secara luas,” jelasnya.

Sementara itu perwakilan dari Wantannas RI mengatakan, tujuan utama kunjungan kerja ini berkaitan dengan verifikasi perekonomian Bali, khususnya di Kabupaten Badung.

“Tadi kami sudah diskusi dengan Bapak Sekda, beserta Kepala Dinas maupun Muspida, dimana kami sudah mendapatkan gambaran terutamanya infrastruktur, regulasi, nomenklatur, anggaran untuk insentif dan perkembangan sektor lainnya,” ujar Agus Syarip Hidayat. (adv)

Wabup Suiasa Terima Kunjungan Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek

WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana menerima kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI Dr. Iwan Syahril di Puspem Badung, Selasa (11/7).

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan program-program pendidikan pusat yang salah satunya adalah Merdeka Belajar.

Wabup Suiasa menjelaskan, pertemuan dengan Dirjen PAUD Dikdasmen ini sebagai upaya membangun sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pendidikan PAUD, sekolah dasar dan sekolah menengah di Badung.

Diakui di daerah masih men-

alami banyak kendala dalam menerjemahkan kebijakan pusat, dimana sering adanya satu konflik regulasi.

"Kita dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini selain menggunakan aturan-aturan yang sifatnya teknis sesuai bidang masing-masing, juga adanya aturan spesifik dari Kemendagri. Yang menjadi kendala yakni, dalam pedoman penyusunan APBD yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Mendagri. Sementara di Kementerian teknis lainnya tidak persis seperti itu, sehingga terjadi kendala dalam menerjemahkan aturan. Untuk itu penting dikomunikasikan dan kami sudah sampaikan agar nanti ada sinergitas, mensinkronkan aturan dari departemen teknis salah satunya kementerian pendidikan dengan Kemendagri. Kita menginginkan, apa yang menjadi kebijakan di kementerian teknis ini bisa



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (lima dari kiri) menerima kunjungan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI Dr. Iwan Syahril (empat dari kiri) di Badung, Selasa (11/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

tertuang dalam kita menyusun APBD yang pedomannya diatur di dalam aturan Kemendagri. Bila tidak disesuaikan maka kita tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan sektor pendidikan," terangnya.

Sementara, Dirjen PAUD Dik-

dasmen, Iwan Syahril menjelaskan, kunjungan ke Kabupaten Badung ini dalam rangka silaturahmi serta menyampaikan program-program pendidikan khususnya pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari pemerintah pusat. (adv)

Pemkab Badung Antisipasi Inflasi Dampak Cuaca Ekstrem

TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali mengantisipasi dampak kondisi cuaca termasuk El Nino terhadap tingkat inflasi yang ada di wilayah itu.

"Kami mengantisipasi inflasi yang dipengaruhi oleh cuaca yang cukup ekstrem yang berpotensi menimbulkan gangguan di proses produksi dan distribusi bahan pokok kepada masyarakat," kata Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Bali, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan informasi dari BMKG bahwa di pertengahan tahun ini akan terjadi kekeringan yang disebabkan oleh El Nino. Selain itu, cuaca buruk juga dapat membuat rantai distribusi terhambat yang berakibat pula pada kenaikan harga di pasaran sebagai

pemicu naiknya inflasi.

Oleh karena itu, menurutnya hal itu perlu diantisipasi sehingga harus dilakukan upaya agar jangan sampai ketersediaan pasokan, distribusi bahan bahan

pokok itu terhambat atau tidak tersedia.

"Untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kami melakukan tindakan nyata seperti pendataan, menambahkan frekuensi pelaksanaan operasi pasar kepada masyarakat, bersinergi dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Perum Bulog dan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana," kata dia.

Wabup Ketut Suiasa menjelaskan pada tahun 2024 I Kabupaten Badung ditetapkan sebagai kabupaten yang mandiri dalam penghitungan indeks inflasi daerah yang sebelumnya sampai saat ini tahun 2023 masih masuk dihitung gabung dengan kota Denpasar.

Dalam hal itu, ada beberapa langkah yang

perlu dipersiapkan, yang pertama apa yang dikonsepsikan tentu akan dibuat roadmap atau peta jalan pengendalian inflasi di Badung.

"Hal ini penting karena nantinya tidak diharapkan ketika sudah mandiri dalam penghitungan Inflasi Daerah, malah pengendalian inflasi kita tinggi, tentu dengan demikian ada suatu upaya sistematis dan sistemik yang nanti kita lakukan untuk membentuk roadmap ini," katanya.

Dengan demikian, dalam waktu dekat Pemkab Badung akan merancang roadmap dan dari roadmap ini akan dibuatkan kalender kerja yang sifatnya bersinergi lintas sektoral dan juga bersinergi dengan program aksinya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat parsial, sepihak-sepihak, sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. (adv)

Sekda Badung Sebut TMMMD Wujud TNI Percepat Pembangunan Desa

SEKDA Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menyebutkan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD) merupakan wujud keterlibatan TNI dalam mempercepat proses pembangunan nasional khususnya di pedesaan.

Hal tersebut dikatakan Arnawa saat menjadi inspektur upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD) Ke-117 Tahun 2023 di hadapan 400 personel gabungan di Lapangan I Gusti Ngurah Rai, Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, Rabu.

"Kegiatan TMMMD ke 117 yang dilaksanakan di Kabupaten Badung pada tahun 2023 merupakan kegiatan terpadu dan terintegrasi yang dapat merangsang partisipasi pada masyarakat dalam pembangunan di pedesaan yang secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Arnawa.

Dia mengatakan pembangunan di wilayah pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan mempunyai arti yang sangat strategis yang akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas masyarakat desa sebagai salah satu sumber kekuatan dalam melaksanakan sistem pertahanan rakyat semesta.

Menurutnya, keberhasilan dalam pembangunan desa berarti meningkatkan pemerataan kesejahteraan yang akan menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, kegiatan TMMMD juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memantapkan kemandirian TNI dan rakyat.

Hal ini sejalan dengan tema TMMMD ke-117 tahun 2023 yaitu dengan semangat sinergitas Pemda dan TNI tingkatkan kemandirian TNI dalam percepatan pembangunan di daerah dalam rangka menjaga keutuhan



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) memberikan dokumen program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMMD) kepada Komandan Korem 163/Wira Satya Brigjen TNI Agus M. Latif di Lapangan I Gusti Ngurah Rai, Desa Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali, Rabu. ANTARA/HO-Humas Korem 163/Wira Satya

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sekda Badung itu pembangunan daerah tidak akan mampu terlaksana oleh pemerintah daerah saja, namun perlu adanya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak untuk saling mengisi dalam pembangunan

seperti hal yang dilaksanakan TNI dan masyarakat dalam bentuk TMMMD.

Oleh karena itu, dirinya yakin bahwa TMMMD menjadi karya bakti nyata TNI kepada masyarakat yang dapat menggerakkan pembangunan di Kabupaten Badung. (adv)

Wabup Suiasa Sampaikan 4 Ranperda Dalam Rapat Paripurna DPRD Badung



Wabup Suiasa menyampaikan Ranperda dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (10/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Kerjasama Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah, pada Sidang Kedua DPRD Badung bertempat di Kantor

DPRD Badung, Senin (10/7).

"Berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022. Seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif," ujar Wabup Suiasa.

Sementara itu terkait Rancan-

gan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Daerah, Wabup Suiasa menyebut, kerja sama daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling membutuhkan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wabup Suiasa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan kerja sama Dewan sehingga rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah dapat diagendakan sebagai wujud pengabdian serta tanggung jawab konstitusional guna menentukan strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung ke depan. (adv)

Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan Buka FGD Bidang Pendidikan di Badung

ASISTEN Administrasi Umum Cok Raka Darmawan membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Pembangunan Bidang Pendidikan yang Adaptif dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Badung yang Unggul dan Berdaya Saing” di Puspem Badung, Senin (10/7).

Cok Raka Darmawan dalam sambutannya mengatakan bahwa FGD yang diinisiasi oleh Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Badung ini berdiskusi tentang Bagaimana Meningkatkan SDM di Kabupaten Badung khususnya di pendidikan dasar untuk menuju kualitas yang lebih baik dan berdaya saing.

FGD ini dihadiri oleh narasumber dari Rektor Undiksa Prof. Lasmana untuk berdiskusi merumuskan kebijakan yang hasilnya akan menjadi rekomendasi kepada pimpinan untuk ke depannya, terutama Badung

saat ini yang belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Pendidikan (RIPP) 25 tahun.

Badung memiliki RIPP untuk menjadi panduan pemangku kepentingan siapa yang memimpin Badung, sudah memiliki blue print tentang mau dibawa kemana arah pembangunan pendidikan khususnya pendidikan dasar di Badung yang dimulai dari PAUD, TK, SD dan SMP itu tujuan dari FGD ini.

Sementara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Badung Wayan Suambara mengatakan terkait dengan inovasi yang perlu dilakukan Badung dalam meningkatkan mutu pendidikan tentunya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Pemkab Badung punya orientasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung.

Dikatakan bahwa generasi muda yang akan datang akan menghadapi sejumlah tantangan



Asisten Administrasi Umum Cok Raka Darmawan (dua kiri) buka Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung, Senin (10/7). (ANTARA/HO-Pemkab Badung)

dan persoalan dinamika yang demikian tinggi baik dari segi kemajuan teknologi, perubahan pola pikir, perubahan perilaku, ini tentu mesti disikapi jangan sampai mereka berada pada jalur yang salah yang tidak produktif.

Untuk kemajuan masyarakat Badung, Brides berpandangan bahwa pembangunan pendidikan di Badung ini mesti diarahkan, untuk tahu kemana arah pendidikan di Badung perlu ada Rencana Induk Pembangunan Pendidikan di Badung. (adv)

Sekda Adi Arnawa Hadiri Acara Penandatanganan Kerja Sama MRT



Sekda Badung Wayan Adi Arnawa (tiga kanan) mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster (enam kanan) tanda tangani kesepakatan bersama dengan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono (lima kiri) tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik bertempat di Jakarta, Senin (10/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

SEKDA Badung Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster tandatangani kesepakatan bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tentang pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik

bertempat di Ruang Pola, Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Adi Arnawa masalah yang dihadapi Provinsi Bali saat ini terutama wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yakni terkait transportasi publik.

Karena itu, Pemprov Bali

bersama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar menimba pengalaman yang selama ini sudah berjalan di Jakarta untuk nantinya diterapkan dengan penyesuaian kondisi yang ada di Bali.

Sekda Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono sepakat untuk memberikan bantuan dan berbagi pengalaman terkait pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) atau kendaraan massal berbasis kereta dalam rangka mengurai masalah kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

“Bapak Penjabat Gubernur DKI juga menyerahkan kepada Pemprov Bali, Kabupaten Badung dan Pemkot Denpasar untuk memilih mana moda transportasi yang sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Hal lainnya disebut Bapak Heru terkait dengan harga

tiket yang dikenakan ke pengguna. Menurutnya harga tiket mungkin bisa lebih mudah ditentukan di Bali dibanding dengan DKI. Karena sifatnya memberikan pelayanan publik terhadap turis dan warga. Nah, sehingga tiket bisa lebih sesuai realitas di lapangan nilainya berapa. Melalui skema subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayar,” ungkapnya.

Melalui kesepakatan bersama ini Sekda Adi Arnawa berharap kemitraan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dapat memberikan harapan positif dan mendorong kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan pembangunan, serta layanan publik yang merata dan berkualitas, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata. (adv)

Wabup Suiasa Menerima Audiensi Pokja PKP dan BPPW Provinsi Bali

WAKIL Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima audiensi tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Badung beserta tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Bali terkait pemaparan pengembangan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Kabupaten Badung, di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Selasa (11/7).

Wabup Suiasa mendorong Tim Pokja PKP untuk melaksanakan percepatan penyelesaian masalah-masalah terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok tim pokja.

“Sebagai pintu pariwisata Bali, Badung memiliki satu tantangan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri dan tantangan secara alami yang tidak bisa dihindari, karena itu tim pokja serta dinas terkait segera mengantisipasi dan me-

nyelesaikan tantangan tersebut dengan dibuatkan regulasi/kebijakan-kebijakan program yang komprehensif, baik dan berkualitas,” ujar Suiasa.

Sementara Ketua Tim Pokja PKP Kabupaten Badung I Made Wira Dharmajaya memaparkan, Pokja PKP memiliki paket kebijakan bertema “Badung Hebat Layanan Sanitasi Aman” dengan paket kebijakan antara lain Peningkatan Akses Sanitasi Aman Melalui Layanan Sambungan Rumah (Salam), Gerakan Aksi Penyedotan Tangki Septik (Gersitasik), Penyusunan Dokumen Air Limbah Domestik (Dokusik), Bersih Sampah Berbasis Sumber Menuju Badung Hebat (Bersama), Kelola Sampah Melalui Peraturan Desa dan Adat/Perarem Berbasis Sumber (Kedas).

Masalah sanitasi merupakan suatu permasalahan kesehatan



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (lima dari kanan) menerima audiensi tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Badung beserta tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Bali di Badung, Selasa (11/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

yang sangat perlu diperhatikan.

“Melalui Program Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman Kabupaten Badung sebagai destinasi pariwisata

dunia memprioritaskan program sanitasi agar terhindar dari penurunan kualitas lingkungan”, jelas Kepala Bappeda Badung. (adv)

TP PKK Badung Terima Kunjungan Kerja TP PKK Kabupaten Minahasa



Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Badung Kristiani Suiasa (kiri) menerima kunjungan kerja TP PKK Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka study tiru terkait program pokok PKK dan sekaligus mempererat tali silaturahmi, di Badung, Selasa (11/7) ANTARA/HO-Pemkab Badung

WAKIL Ketua TP PKK Kabupaten Badung Kristiani Suiasa menerima kunjungan kerja TP PKK Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka study tiru terkait program pokok PKK dan sekaligus mempererat tali silaturahmi, di

Badung, Selasa (11/7).

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Badung Kristiani Suiasa menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa bersama rombongan yang sudah menentukan pilihan di Kabupaten Badung untuk

mengadakan kunjungan sekaligus study tiru terkait program pokok PKK.

“Melalui kunjungan ini tentunya kami TP PKK Kabupaten Badung sangat menyambut baik kedatangan rombongan TP PKK Kabupaten Minahasa karena secara otomatis dapat menambah PAD Kabupaten Badung. Kami juga berharap tujuan dari kunjungan ke Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa terpenuhi, sambil sharing tukar pikiran dan tukar pengalaman,” ujarnya.

Kristiani Suiasa juga menjelaskan bahwa di Badung terdiri dari 6 Kecamatan dimana dari ujung utara merupakan daerah pertanian di bagian tengah adalah Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung serta di ujung selatan adalah daerah pariwisata yang merupakan sumber PAD Kabupaten Badung.

“Terkait kegiatan TP PKK kami di Kabupaten Badung

mempunyai banyak kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya kegiatan sosial, pasar murah, gotong royong bersih-bersih (mareresik), sosialisasi penanggulangan narkoba, sosialisasi posyandu dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan melalui kunjungan ini nantinya dapat menambah pengalaman yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Minahasa serta dapat mempererat tali silaturahmi, serta nantinya kami TP PKK Badung bisa membalas kunjungan ke Kabupaten Minahasa,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa Fenny Ch. Roring Lumanauw mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Badung dan jajaran karena sudah diterima dengan baik dalam kunjungannya di Pulau Bali khususnya Kabupaten Badung. (adv)

DPRD Ajukan Pemberhentian Masa Jabatan Bupati Gianyar

KETUA DPRD Kabupaten Gianyar, Bali, I Wayan Tagel Winarta dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengusulkan pemberhentian masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, karena telah berakhirnya masa jabatannya.

"Dengan ini kami pimpin DPRD Kabupaten Gianyar mengumumkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Gianyar masa jabatan Tahun 2018 - 2023 akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 September 2023," ujar Tagel Winarta, saat memimpin sidang paripurna, demikian siaran pers Diskominfo Gianyar, Sabtu.

DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana tugas dan wewenangnya akan mengusulkan pemberhentian dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali untuk ditindaklanjuti.

Di lain sisi, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan dengan adanya pengumuman usul pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Gianyar periode 2018-2023, dirinya mengucapkan terimakasih kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Gianyar.

"Saya mengucapkan terimakasih atas hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Suasana kondusif yang telah terbina selama ini tentunya merupakan satu hal positif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gianyar yang kita cintai bersama," ujarnya.

Dalam sidang yang juga dihadiri Kepala Desa se-Gianyar tersebut juga ditetapkan Ranperda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rancangan Perda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4



Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyerahkan pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024. ANTARA/HO-Humas Gianyar

Tahun 2012 tentang Surat izin usaha perdagangan, dan Rancangan Perda Perubahan atas Perda nomor 13 Tahun 2015 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar.

Bupati Gianyar Mahayastra dalam sidang tersebut juga menyerahkan pengantar kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024. (ant)



Pementasan tari tradisional Tabanan dalam Festival Desa Delod Peken, Tabanan, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan, Bali mengatakan Festival Desa Delon diselenggarakan untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya tradisional kepada generasi muda.

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya di Tabanan, Bali, Sabtu, mengatakan selain sebagai ajang promosi, festival budaya Desa Delod Peken ke-5 itu juga bertujuan memberikan kesempatan

bagi masyarakat untuk belajar dan memahami lebih dalam tentang budaya mereka sendiri.

Bupati Sanjaya pun memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan festival budaya Desa Delod Peken Tabanan yang melibatkan banyak pihak terutama para seniman, Seka Teruna, dan juga komunitas Banjar Adat setempat.

Pergelaran festival itu diyakini memperkuat identitas budaya

Festival Desa Delod Peken Promosikan Budaya

lokal serta memberikan kesadaran akan pentingnya tradisi, seni, adat, praktik budaya, dan juga perkembangan ekonomi masyarakat.

"Adanya festival atau pun kesenian dalam festival adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari krama, oleh krama, untuk krama, sebagai penikmatnya, inilah salah satu manfaatnya," kata Sanjaya.

Sanjaya mengatakan keterlibatan semua pihak sangat penting dalam festival itu mengingat tujuannya adalah untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya tradisional masyarakat Tabanan.

"Generasi mendatang mempunyai kesempatan untuk belajar dan lebih memahami tentang

budaya sendiri, terlebih Desa Delod Peken dulunya memiliki maestro seni yang gaungnya sampai ke manca negara yang harus terus diregenerasi," katanya.

Bupati mencontohkan maestro seni Tabanan I Ketut Maria yang melegenda dengan Tari Oleg Tamulilingan, Tari Gebyar Duduk, hingga Tari Terompong.

Gede Sanjaya berharap melalui festival ini akan lahir kembali legenda-legenda baru yang mengikuti jejak maestro seni terdahulu, sehingga tidak menjadi kenangan semata. Ke depannya Sanjaya mencanangkan ajang seperti ini menjadi suatu kebanggaan yang terus dilakukan secara terus menerus. (ant)

Bupati Bangli Letakkan Batu Pertama Pembangunan Laboratorium Bio Safety

BUPATI Bangli Sang Nyoman Sedana Arta meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Laboratorium Bio Safety Level II Kabupaten Bangli yang berlokasi di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bangli, Bali.

“Ini dalam rangka mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Bangli, melalui pola pembangunan semesta berencana wujudkan Bangli Era Baru, melalui misi kedua yakni mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan bagi seluruh Krama Bangli,” kata Bupati Bangli dalam siaran persnya di Bangli, Sabtu.

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli beserta jajaran, pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkab Bangli,

konsultan perencanaan, pelaksana dan pengawas.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli, dr. Nyomam Arsana dalam laporannya menyampaikan pembangunan Laboratorium Bio Safety Level II di Kabupaten Bangli, merupakan pembangunan laboratorium yang nantinya berfungsi sebagai laboratorium infeksius atau penyakit menular.

Dengan menggunakan dana DAK pusat, pembangunan ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2023.

Pihaknya menambahkan saat ini semua pasien yang berobat harus berbasis data maka sangat penting di Bangli dibangun laboratorium seperti ini, didukung dengan SDM yang berkompeten di bidangnya, sehingga pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Bangli menjadi lebih maksimal.

Sementara itu Bupati Bangli menyampaikan laboratorium



Bupati Bangli Sedana Arta (baju hitam) meletakkan batu pertama laboratorium Bio Safety pertama. ANTARA/HO-Pemkab Bangli

adalah sesuatu yang cukup sensitif di tengah situasi kesehatan masyarakat global yang memerlukan atensi dari berbagai hal tentang kesehatan.

Bupati juga menegaskan kepada konsultan pengawas agar selalu bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan laboratorium ini, agar menda-

ptakan hasil sesuai dengan perencanaan, agar nantinya seluruh masyarakat Bangli yang membutuhkan pelayanan cek lab dapat terlayani dengan baik.

Begitu juga dengan fasilitas dan Sumber Daya Manusia harus diisi sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh laboratorium ini. **(ant)**

Bupati Klungkung Imbau Masyarakat Waspada Dampak Cuaca Ekstrem



Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta (kanan) berbincang dengan warga terdampak banjir yang dievakuasi ke Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung, Bali, Jumat (7/7/2023). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Klungkung)

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta mengimbau warganya mewaspada kemungkinan terjadi bencana alam akibat kondisi cuaca ekstrem. Dia menyampaikan imbauan itu saat meninjau kondisi warga yang dievakuasi ke Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya pada Jumat (7/7) karena

permukiman mereka terdampak banjir akibat hujan lebat pada Kamis (6/7) malam.

Menurut siaran pers Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Klungkung di Bali, Sabtu, Bupati mengajak warga yang terdampak banjir beristirahat di Pesanggrahan yang dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten Klungkung.

Namun, warga menolak untuk pindah karena merasa sudah nyaman tinggal sementara di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya. Bupati memberikan kebebasan kepada warga untuk memilih tempat singgah yang disediakan bagi korban banjir.

“Apabila cuaca masih buruk dan terdapat warga yang merasa tidak nyaman untuk beristirahat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, maka kami akan memindahkan mereka ke Pesanggrahan,” kata Bupati.

Suwirta mengatakan bahwa dia telah menginstruksikan langkah-langkah penanganan dampak bencana serta memantau pelaksanaannya. Dia juga mengimbau warga memperhatikan ancaman bencana akibat kondisi cuaca ekstrem di wilayah tempat tinggal masing-masing.

“Mari masyarakat Klungkung

tingkatkan kewaspadaan dan berdoa agar cuaca buruk ini segera berlalu sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya,” kata Nyoman Suwirta.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klungkung I Putu Widiada mengatakan bahwa bantuan sudah disalurkan kepada warga yang terdampak banjir.

BPBD bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Taruna Siaga Bencana, TNI, Polri, dan instansi terkait lain dalam menangani dampak bencana alam, termasuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir.

I Putu Widiada menyampaikan bahwa bantuan berupa makanan serta alas tidur beserta bantal dan selimut sudah diberikan kepada warga yang terdampak banjir di Kelurahan Semarang Kangan. **(ant)**

Pemkab Buleleng Buat Rencana Induk Kota Cerdas Bersama Kominfo

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, mulai merancang rencana induk (master plan) menuju kabupaten cerdas (smart city) melalui pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.

"Pelatihan teknis ini untuk membuat rencana induk atau peta jalan tentang kabupaten/kota cerdas agar terdokumentasi dengan baik," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana di Hotel Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Bali, Kamis.

Adapun Buleleng bersama dengan Karangasem menjadi dua kabupaten di Bali dan termasuk 50 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia yang terpilih mendapatkan pendampingan dari Kemenkominfo RI.

Lihadnyana menjelaskan bahwa bimbingan teknis tersebut memuat langkah-langkah dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Langkah-langkah tersebut, lanjut dia, nanti tentunya mengarah pada implementasi Buleleng sebagai kabupaten/kota cerdas.

"Program ini dari pemerintah pusat. Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Buleleng menuju kabupaten cerdas. Terima kasih kepada Kemenkominfo RI yang sudah menunjuk Buleleng untuk mendapatkan pendampingan. Pendampingan akan dilakukan terus," katanya.

Dalam menyusun rencana induk, penyiapan sumber daya manusia (SDM) juga sangat diperlukan. Selain itu, sistem yang mumpuni juga diperlukan, serta sarana dan prasarana.

Sementara, untuk desa-desa di Kabupaten Buleleng dan tempat-tempat umum lainnya sudah terpasang jaring wifi gratis. Namun, masih ada beberapa tempat di Buleleng yang belum tersentuh sinyal komunikasi.

Lihadnyana mengatakan bahwa permohonan agar tempat-



Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana (tengah) berpose bersama sejumlah pejabat tinggi Kabupaten Buleleng usai mengikuti kegiatan bimbingan teknis di Hotel Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Bali, Kamis (6/7/2023). ANTARA/HO-Humas Pemkab Buleleng

tempat tersebut tersentuh sinyal komunikasi sudah dilakukan ke Kemenkominfo RI agar semua tempat tersentuh sinyal.

"Jika satu ini berjalan, kami ubah pola pikir kita semua agar berbasis digital. Jejak digital juga bisa dilihat jika semua tersentuh

sinyal komunikasi. Antisipasi juga dilakukan dengan pemanfaatan Menara Turyapada. Seperti gayung bersambut, setelah selesai rencana induk tahap pertama, bisa memanfaatkannya. Itu kerja kolaboratif antarwilayah," kata Lihadnyana. (ant)

Bupati Jembrana Bantu Ribuan Warga Korban Banjir



Bupati Jembrana I Nengah Tamba memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir di Jembrana, Bali, Sabtu. (ANTARA/Gembong Ismadi)

BUPATI Jembrana, Provinsi Bali I Nengah Tamba membantu ribuan warga korban banjir yang terjadi Jumat (7/7) lalu.

"Salah satu desa dengan korban paling banyak adalah Desa Pengambangan. Meskipun tidak ada korban jiwa, ratusan rumah di desa ini terendam banjir," kata dia saat menyalurkan bantuan

korban banjir di tenda pengungsian yang didirikan di Kantor Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Sabtu.

Selain ke Pengambangan, ia bersama rombongan juga mendatangi lokasi banjir di Samblong serta abrasi pantai di Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru.

Khusus Desa Pengambangan,

lanjutnya, pemerintah telah membangun drainase dengan anggaran Rp1,3 miliar.

"Adanya drainase itu sebenarnya cukup membantu, tapi karena curah hujan yang tinggi, banjir lumayan besar tetap terjadi di Pengambangan," katanya.

Dalam kunjungan ini, ia bersama anggota DPR RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra serta Komandan Kodim 1617 Jembrana Letnan Kolonel Infanteri Teguh Dwi Raharja.

Ia berharap, anggota DPR RI yang hadir bisa memperjuangkan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di Pengambangan.

Demikian juga terkait abrasi di Pabuahan, dia mengatakan, Pemkab Jembrana tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

"Hari ini kami sudah petakan

lokasi banjir dan abrasi, kami minta dukungan dari teman-teman di pusat serta pihak balai," katanya.

Kepala Dinas Sosial Jembrana I Gusti Bagus Ketut Oka Parwata mengatakan, penyaluran bantuan yang dilakukan bersama BPBD Kabupaten Jembrana antara lain nasi bungkus, matras, selimut dan lain-lain.

"Wilayah yang kami prioritaskan Pengambangan dan Pebuahan, karena kondisinya cukup parah hingga masyarakat tidak dapat beraktivitas normal," katanya.

Kepala Desa Pengambangan Kamaruzzaman mengatakan, sebanyak 1000 KK di wilayahnya terdampak banjir.

"Banjir merendam rumah di Banjar Munduk, Banjar Kelapa Balian dan Ketapang lampu. Kurang lebih 1000 keluarga terdampak," katanya. (ant)